BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1. KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang telah direncanakan. Jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Dengan demikian, Terdapat beberapa pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mendefinisikan implementasi sebagai proses untuk memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Ini mencakup semua kejadian dan kegiatan yang bertujuan untuk mengadministrasikan kebijakan agar dapat menimbulkan dampak atau akibat nyata pada masyarakat. (Pramono, 2020)
- 2) Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan. (Pramono, 2020)

3) Menurut Parsons (dalam Joko Pramono, 2020) Implementasi kebijakan diartikan sebagai "proses yang melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan prosedur birokrasi yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan publik yang konkret." Definisi ini menyoroti kompleksitas implementasi yang melibatkan berbagai elemen birokrasi dan interaksi antaraktor.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekadar tindakan tunggal yang langsung, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan serangkaian kegiatan dan banyak pihak, baik individu maupun organisasi, dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bekerja sama untuk mengubah suatu keputusan kebijakan yang bersifat konseptual menjadi tindakan operasional yang nyata di lapangan.

Adapun, Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006); (Pramono, 2020) mengajukan empat variabel, sebagai berikut:

- 1) Komunikasi Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya ketahanan dari kelompok sasaran.
- 2) Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kemampuan penyelenggara, dan sumber daya keuangan.
- 3) Disposisi, yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh penyelenggara, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh penyelenggara menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan.

4) Struktur Birokrasi, Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh terhadap imlementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (Standard Oprational Procedures atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implementor kebijakan

2.1.2 KONSEP EFEKTIVITAS PROGRAM

Menurut (Amroni et al., 2023) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas juga merupakan ukuran seberapa baik tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang tercermin pada hasil akhirnya. Tujuan utama adalah hasil akhir. Ketika semakin mendekati hasil yang diinginkan, efektivitasnya meningkat. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan; semakin besar kontribusi keluaran (sumbangan) terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Dalam kaitan ini, keluaran yang ada di sini merupakan hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran sasaran atau tujuannya adalah untuk menyemangati masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan setelah merdeka. Program ini dapat dikatakan efektif apabila hasilnya menunjukkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan anggota masyarakat sehingga memenuhi tujuan awal yang telah ditetapkan (Amroni et al., 2023).

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan – tujuan atau sasaran – sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjukkan pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Program dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana menyeluruh yang meliputi penggunaan macam – macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam bentuk sebuah pola yang menyatu dan yang menetapkan suatu urutan tindakan – tindakan yang perlu dilaksanakan serta schedule – schedule waktu untuk masing – masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran – sasaran yang ditetapkan (Hasna et al., 2025).

Jadi yang dimaksud dengan program adalah rencana yang luas yang mengandung penggunaan berbagai sumber daya untuk waktu yang akan datang dalam bentuk suatu pola yang akan menentukan suatu urutan kegiatan dengan waktuya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. (Najidah & Lestari, 2019) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanannnya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, impelementasi, dan hasil yang di capai.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh suatu kelompok, dimana didalamnya terdapat tugas-tugas pokok.

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria pengukuran efektivitas, adapun menurut (Najidah & Lestari, 2019) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabelvariabel sebagai berikut:

- 1. Ketetapan Sasaran Program yaitu sejauhmana keberhasilan peserta program sesuai dengan tepat sasaran yang telah ditentukan.
- Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasimengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3. Pencapaian Tujuan Program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

4. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program.

Kemudian menurut (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) untuk mengukur suatu efektivitas program didalam sebuah organisasi menggunakan lima indikator yaitu:

- a. Pemahaman Program; melihat sejauh mana suatu organisasi dan/atau masyarakat dapat memahami program dalam mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama.
- b. Tepat Sasaran; melihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Ketepatan sasaran ini dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kesesuaian program yang telah dirancang oleh pejabat atau pengelola kepada kelompok sasaran Indikator ini dengan target yang dituju.
- c. Tepat Waktu; melihat penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Pelaksanaan program perlu direncanakan kegiatan dan dijadwalkan bagaimana proses pelaksanaannya agar dapat terukur sejauh mana program tesebut untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
- d. Tercapainya Tujuan; melihat pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Perubahan Nyata; melihat sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyakat ditempat. Perubahan nyata dapat dilihat dari bentuk sebelum dan sesudah adanya program yang telah ditetapkan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai.

pengukuran efektivitas program yang paling menonjol adalah sebagai berikut : Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat output dan input, serta Pencapaian tujuan menyeluruh (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020)

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas program diatas, maka peneliti menggunakan indikator untuk mengukur efektivitas menurut (Nurfauziah &

Nurcahyanto, 2020) karena teori tersebut cocok untuk menganalisis Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di Perguruan Tinggi Universitas Lampung.

2.1.3 KONSEP PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada dasarnya adalah suatu keputusan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi siswa, yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penyelenggaraan tugas pendidikan.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu dari program perlindungan sosial

yang dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi; Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah (Nadia Nadia et al., 2024). Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) diprioritaskan kepada anak yang berusia 6 – 21 tahun. Persyaratan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan formal adalah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Sekolah dan diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis Kemendikbud. Sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Puslapdik pada tahun 2023 adalah sebanyak 9.745.403 peserta didik dengan jumlah siswa SMA/Sederajat sebanyak 774.205 peserta didik. Besaran dana PIP per peserta didik untuk SMA adalah sebesar Rp 1.000.000 per tahun bagi siswa XI SMA dengan program 3 tahun. Sementara bagi siswa kelas X dan XII SMA mendapatkan dana PIP untuk satu semester sebesar Rp 500.000. Adapun jumlah besaran beasiswa yang diterima oleh tiap mahasiswa yakni Rp. 6 juta yang kemudian Rp. 2,4 juta di serahkan kepada pihak kampus sebagai bayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Rp. 4,2 juta diserahkan kepada mahasiswa sebagai uang saku mereka guna membeli keperluan perkuliahan.

Besaran UKT yang diperoleh oleh mahasiswa KIP – Kuliah merdeka disesuaikan dengan akreditasi jurusan yang ia tempuh. semakin tinggi akreditas jurusan pada universitas yang ia tempuh, semakin besar pula jumlah bayaran UKT nya (Fahmi & Stiawati, 2023).

Dana PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- 2. Pembelian pakaian dan perlengkapan perkuliahan (sepatu, tas, dll)
- 3. Transportasi siswa ke sekolah
- 4. Uang saku siswa ke sekolah
- 5. Biaya kursus/les tambahan

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, antara lain: judi, narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya. Setelah menerima dana Program Indonesia Pintar peserta didik mempunyai kewajiban kewajiban menggunakan dana Program Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana, terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

Menurut (Marsa & Santoso, 2025) Mekanisme pelaksanaan program indonesia pintar (pip), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mekanisme Pengusulan Pengusulan calon penerima PIP menurut Petunjuk Teknis Kemendikbud yaitu peserta didik dari keluarga pemilik PKH/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri (updating) data peserta didik calon penerima PIP 2023 ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis.
- Mekanisme Penetapan Penerima Penetapan penerima Program Indonesia Pintar
 (PIP) ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya: a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota;

- b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis sedangkan untuk usulan SMA yang berada dibawah binaan provinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Mekanisme Penyaluran Penyaluran dana PIP 2023 dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan daftar penerima PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui Tabunganku dan virtual account. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mencairkan dana PIP di lembaga penyalur. Mekanisme Pengambilan Dana Pencairan dana PIP dillakukan oleh penerima membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan menunjukan KTP orang tua. Penerima menandatangani bukti penerimaan dana ang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang menggunakan virtual account dan berada di daerah terpencit dapat melakukan pengambilan secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah atau bendahara.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu memiliki peran penting yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merancang tahapan penelitin secara terstruktur. Ada beberapa riset dan penelitian yang telah dilakukan yang dapat peneliti temukan dan relevan terkait Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam hal ini peneliti menemukan dua skripsi dan satu jurnal nasional tentang efektivitas PIP. Penyajian penelitian terdahulu

ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengkayaan konsep terkait Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP).

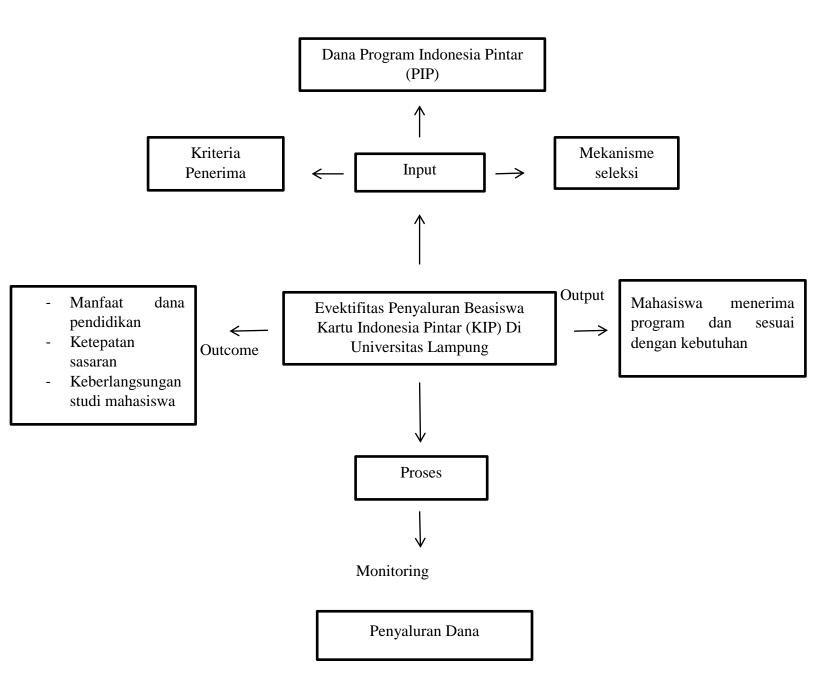
NO	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian		penelitian	Penelitian
1.	(Setyawati,	Berdasarkan	Sama-sama	Peneliti fokus
	2018),	hasil penelitian,	meneliti	pada tingkat
	Efektivitas	diketahui	efektivitas	Sekolah
	Program	efektifitas	Program KIP.	Menengah
	Kartu	program Kartu	Topik dan ruang	Kejuruan
	Indonesia	Indonesia	lingkup yang	(SMK) di
	Pintar (KIP)	Pintar bagi	serupa, yaitu	Kabupaten
	bagi Siswa	siswa SMK di	evaluasi	Cilacap,
	SMK di	Kecamatan	implementasi	sedangkan
	Kecamatan	Jeruklegi	kebijakan	penelitian ini
	Jeruklegi	Kabupaten	pemerintah.	berfokus
	Kabupaten	Cilacap lebih		pada jenjang
	Cilacap	dari 70%. Hal		pendidikan
		ini dibuktikan		tinggi
		dengan rata-rata		(Kuliah) di
		sebesar 92,10		Universitas
		yang lebih		Lampung.
		besar dari 78,4		
		dan hasil uji t		
		yang memiliki		
		signifikansi		
		sebesar 0,000		
		yang lebih kecil		
		dari 0,05.		

2.	(Nurfadillah,	Hasil penelitian	Sama-sama	Peneliti
	2024),	memperlihatkan	meneliti	berfokus
	Efektivitas	bahwa Program	efektivitas	pada tingkat
	Program	PIP di SMA	Program	Sekolah
	Indonesia	Negeri 15	KIP/PIP.	Menengah
	Pintar (PIP)	Makassar telah	Menggunakan	Atas (SMA)
	di SMA	berjalan efektif,	pendekatan	di Makassar,
	Negeri 15	meskipun	kualitatif dan	sementara
	Makassar	masih terdapat	menganalisis	penelitian ini
		beberapa	keberhasilan	mengkaji
		kekurangan.	program dari	implementasi
		Penelitian ini	beberapa aspek.	KIP-Kuliah
		menggunakan		di Universitas
		teori efektivitas		Lampung.
		Sutrisno (2010)		Selain itu,
		dengan 5		peneliti
		indikator:		menggunakan
		pemahaman		teori
		program, tepat		efektivitas
		sasaran, tepat		Sutrisno
		waktu,		(2010),
		tercapainya		sementara
		tujuan, dan		penelitian ini
		perubahan		berfokus
		nyata.		pada konsep
				implementasi
				kebijakan

3.	(Fahmi &	Implementasi	Sama-sama	Peneliti
	Stiawati,	program KIP-	meneliti	berlokasi di
	2023),	Kuliah telah	implementasi	Universitas
	Implementasi	berjalan dengan	Program KIP-	Sultan Ageng
	Program	baik, meskipun	Kuliah dan	Tirtayasa
	Kartu	masih ada	memiliki fokus	(UNTIRTA),
	Indonesia	beberapa isu,	yang serupa	sementara
	Pintar Kuliah	seperti program	pada tingkat	penelitian ini
	Merdeka di	yang tidak tepat	universitas.	dilakukan di
	Universitas	sasaran,	Mengidentifikasi	Universitas
	Sultan Ageng	keterlambatan	isu-isu yang	Lampung.
	Tirtayasa	pencairan dana,	sama seperti	
		dan kurangnya	ketidaktepatan	
		transparansi.	sasaran dan	
			keterlambatan	
			pencairan dana	

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:



2.4 HIPOTESIS

H1= Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berpengaruh dan cukup baik dalam pelaksanaanya, meskipun belum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena terkendala oleh hambatan

H0=Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak berpengaruh besar terhadap keefektifan program di Universitas Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amroni, M. Al, Alhadihaq, M. Y., & Sumiati, N. (2023). Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 158. https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1521
- Fahmi, T. N., & Stiawati, T. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Ilmiah Negara*, *15*(1), 68–80.
- Hasna, Setiawan, I., & Febriadi, H. (2025). *Herry Febriadi | Efektivitas Program Indonesia*. 1111. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1182
- Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (2025). Implementasi Program Pndonesia Pintar (PIP) Di SMA Kecamatan Banyumanik Bota Semarang. *Journal of Public Policy and Management*, 1, 631–648. https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49149
- Nadia Nadia, Fitri Kurnianingsih, & Ramadhani Setiawan. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 181–194. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.521
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nurfadillah. (2024). Skripsi Efektivitas Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sma Negeri 15 Makassar Program Studi Administrasi Publik.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 15–34.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar

Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104. https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886

Setyawati, S. (2018). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar). *Iain Purwokerto : Skripsi*, 12, :1-106. https://eprints.uinsaizu.ac.id/3408/2/SARAS ~1.pdf